

LAPORAN KEUANGAN BERKELANJUTAN

Tahun 2025

PERNYATAAN BATASAN DAN SANGGAHAN

Laporan Keberlanjutan 2025 PT Jamkrida Jateng (selanjutnya disebut sebagai “Perusahaan”, atau “kami”) adalah laporan yang terpisah dari Laporan Tahunan tetapi bersifat saling melengkapi. Laporan ini memuat kinerja keberlanjutan Perusahaan dari aspek ESG (*Environmental, Social, and Governance*), penerapan strategi dan kebijakan keberlanjutan, serta proyeksi dan rencana yang digolongkan sebagai pernyataan berwawasan ke depan (*forward-looking statements*).

Data yang disampaikan dalam laporan ini sudah diverifikasi. Pernyataan berwawasan ke depan dibuat berdasarkan asumsi dari kondisi terkini dan prediksi lingkungan bisnis Perusahaan di masa datang. Pernyataan tersebut memiliki risiko ketidakpastian dan dapat menyebabkan perbedaan secara material dari yang dilaporkan.

Perusahaan tidak menjamin ketepatan informasi karena kemungkinan adanya perubahan kondisi, regulasi, atau penyesuaian target yang tidak dapat diprediksi dari sekarang. Pembaca diharapkan dapat menginterpretasikan informasi dalam laporan ini secara hati-hati dan seksama.

DAFTAR ISI

1. Pernyataan batasan dan sanggahan	1
2. Daftar isi	2
3. Tentang laporan berkelanjutan.....	3
4. Capaian kinerja keberlanjutan 2025	4
5. Ikhtisar kinerja keberlanjutan	6
6. Strategi keberlanjutan	7
7. Policy commitment.....	9
8. Roadmap implementasi keuangan berkelanjutan	10
9. Tentang kami.....	10
10. Tata kelola berkelanjutan	12
11. Produk, layanan, dan kegiatan usaha yang dijalankan.....	13
12. Rantai pasok (supply chain).....	13
13. Keanggotaan pada asosiasi	13
14. Perubahan perusahaan yang bersifat signifikan pada organisasi	14
15. Penentuan topik material	14
16. Tanggung jawab laporan keberlanjutan tahun buku 2025	15

TENTANG LAPORAN BERKELANJUTAN

Laporan Berkelanjutan 2026 disusun berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 51/POJK.03/2017 Lampiran II tentang Penerapan Penerapan Keuangan Berkelanjutan Bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten, dan Perusahaan Publik.

Makna keberlanjutan bagi PT. Jamkrida Jateng (Perseroda) adalah komitmen untuk menjaga keberlanjutan usaha dengan tanggung jawab terhadap nasabah, karyawan, pemegang saham, lingkungan, serta memberikan kontribusi kepada pengembangan ekonomi masyarakat luas.

Laporan Keberlanjutan 2025 adalah laporan terpisah yang bersifat melengkapi Laporan Tahunan 2025. Laporan ini menyampaikan informasi terkait kinerja ekonomi serta kinerja lingkungan, sosial, dan tata kelola (ESG). Data yang disajikan mencakup data dari 1 Januari–31 Desember 2025 dan data periode 2 tahun sebelumnya sebagai perbandingan

Laporan ini menyajikan data dan informasi yang diperoleh dari Kantor Pusat dan sudah divalidasi oleh unit kerja terkait. Terdapat data tahun sebelumnya yang disajikan kembali (restated)

Data dan informasi yang disajikan dalam laporan telah divalidasi oleh unit kerja terkait serta telah disetujui oleh Direksi dan Dewan Komisaris..

CAPAIAN KINERJA KEBERLANJUTAN 2025

A. Aspek Ekonomi

1. Penjaminan berkelanjutan,

Penjaminan yang dapat diategorikan kegiatan usaha berkelanjutan diantaranya penjaminan adalah penjaminan kredit untuk UMKM dan usaha produktif, PAMSIMAS, penggunaan lahan berkelanjutan (pertanian) sebagai berikut :

Nilai Penjaminan : Rp. 2.816.838.709.242,-

Jumlah Terjamin : 596.058 terjamin

2. Investasi berkelanjutan

Jumlah Investasi berkelanjutan : Rp 166.057.500.000,-

B. Aspek Lingkungan

1. Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan

Penggunaan Dana CSR sebagai tanggung jawab sosial dan lingkungan

Dasar Pemikiran

Penyaluran dana melalui CSR merupakan salah satu tanggung jawab sosial dari PT. Jamkrida Jateng (Perseroda)

Kegiatan

Melakukan penyaluran dana CSR ke korban bencana alam dan penyaluran dana CSR ke Lembaga Keagamaan, Lembaga Sosial dan Lembaga Pendidikan

Sumber Daya

Sumber dana untuk CSR 2026 adalah 3% dari Laba Setelah Pajak Tahun buku 2025

Dana untuk kegiatan tanggung jawab sosial dan lingkungan adalah sebesar Rp.421.761.500 (empat ratus dua puluh satu juta tujuh ratus enam puluh satu ribu lima ratus rupiah).

Sistem Evaluasi Pelaksanaan Program

Dilakukan evaluasi dan monitoring terhadap para penerima bantuan

Tantangan dan Rencana Kedepan

Permintaan bantuan yang kurang tepat sasaran dan melakukan konfirmasi terhadap permintaan bantuan yang masuk ke PT. Jamkrida Jateng

2. Konsumsi Energi

Perusahaan menjalankan program penghematan energi listrik, air, sarana telekomunikasi dalam lingkungan yang pelaksanaannya dikontrol secara terus menerus oleh bagian GA. Penggunaan energi listrik dan air disesuaikan dengan kebutuhan serta menerapkan gerakan mematikan lampu pada saat istirahat atau tidak digunakan

Penggunaan Listrik

Perusahaan berkomitmen untuk mengelola penggunaan energi listrik secara efisien melalui penerapan program penghematan yang terstruktur dan berkelanjutan. Penggunaan listrik disesuaikan dengan kebutuhan operasional dan berada di bawah pengawasan rutin oleh bagian *General Affairs* (GA). Dalam implementasinya, perusahaan menerapkan kebijakan penghematan energi, antara lain dengan mematikan lampu dan peralatan elektronik pada saat tidak digunakan atau di luar jam operasional, guna meningkatkan efisiensi serta mendukung keberlanjutan lingkungan.

Penggunaan Air

Perusahaan juga melakukan pengelolaan penggunaan air secara bijaksana sebagai bagian dari upaya konservasi sumber daya. Penggunaan air disesuaikan dengan kebutuhan operasional serta diawasi secara berkala oleh bagian *General Affairs* (GA). Perusahaan menerapkan langkah-langkah penghematan, seperti memastikan penggunaan air dilakukan secara efektif dan menghentikan aliran air pada saat tidak digunakan. Upaya ini bertujuan untuk mendukung efisiensi operasional sekaligus menjaga kelestarian sumber daya air.

3. Penerapan paperless atau penghematan kertas

Dalam era digital seperti saat ini, Perusahaan dalam menjalankan kegiatan usaha telah melakukan dokumentasi yang telah dilakukan secara digital. Penerbitan e-sertifikat juga telah dilaksanakan dengan mitra dengan pertimbangan efisiensi dan efektifitas. Penerapan *paperless* juga dapat mengurangi beban operasional dan Perusahaan juga turut berperan serta dalam menjaga kelestarian lingkungan hidup.

4. Pembatasan penggunaan plastik

Dibatasiya penggunaan bahan plastik di dalam lingkungan Perusahaan untuk mengurangi limbah plastik yang berlebihan. Perusahaan telah mengurangi penggunaan botol plastik pada saat rapat serta membudayakan untuk menggunakan peralatan milik pribadi.

C. Aspek Sosial

1. Karyawan telah menerima pelatihan keuangan berkelanjutan
2. Pelatihan dan pengembangan kapasitas internal 841 jam
3. Employee Engagment Survey (skala 1-4) : 80.73
4. Indeks Kepuasan Nasabah (skala 1-100) : 84.35

D. Aspek Tata Kelola

- Perusahaan memperoleh penghargaan KIP Awards (keterbukaan Informasi Publik) kategori Informatif yang diselenggarakan oleh Komisi Informasi Publik Jawa Tengah.
- Penyesuaian kebijakan dengan aspek ESG
Upgrade core system Perusahaan dari Appline V2 ke V3 yang dapat meningkatkan efektifitas dan efisiensi.

IKHTISAR KINERJA KEBERLANJUTAN

Kinerja Aspek Ekonomi

Uraian	Satuan	2025	2024	2023
Kinerja Internal				
Pendapatan Operasional	Rp Miliar	124 Miliar	83 Miliar	51 Miliar
Laba Bersih	Rp Miliar	18,6 Miliar	16,8 Miliar	14,3 Miliar
Nilai Penjaminan	Rp Miliar	2.816 Miliar	4.006 Miliar	4.561 Miliar
Jumlah Terjamin	Terjamin	596.058	533.936	622.919

Kinerja Aspek Sosial

Uraian	Satuan	2025	2024	2023
Kinerja Internal				
Total Karyawan		63	56	56
Karyawan perempuan dibandingkan total karyawan	%	40%	36%	39%
Jumlah Jam Pelatihan	jam	841	1088	414
Biaya pengembangan dan kompetensi karyawan	Rp juta	Rp. 239.770.548	Rp. 200.402.641	Rp. 181.725.391
Employee Engagement Survey	Skala 1-100	80,02	76,64	82,94
Survey kepuasan pelanggan	Skala 1-100	84,35%	83,61%	85,54
Persentase pengaduan (whistleblowing) yang telah selesai diinvestigasi dari total pengaduan yang diterima	%	0%	0%	0%
Tingkat penyelesaian keluhan nasabah	%	100%	100%	100%
Kegiatan Tanggung Jawab Sosial				
Realisasi dana kegiatan tanggung jawab sosial (TJSL)	Rp	Rp. 421.761.500	Rp. 560.852.285	Rp.533.226.000
Kegiatan edukasi literasi dan inklusi keuangan syariah	Orang	100	100	100

Kinerja Aspek Lingkungan Hidup

Uraian	Satuan	2025	2024	2023
Kinerja Internal				
Penggunaan Bahan bakar	Liter	31.929	37.905	33.091
Penggunaan Energi Listrik	Kwh	93.312	93.136	99.264
Penggunaan Kertas	Rim	550	560	1.143
Penggunaan Air	m ³	9.256	9.339	9.953

STRATEGI KEBERLANJUTAN

Perusahaan meyakini bahwa keuangan berkelanjutan sejalan dengan “Perusahaan didirikan tidak semata-mata mencari keuntungan, namun dapat menjadi triger pertumbuhan dan peningkatan pendapatan UMKM dan koperasi”. Melalui penerapan keuangan berkelanjutan, Perusahaan berkomitmen untuk menjalankan bisnis penjaminan yang mengedepankan keberimbangan antara kinerja finansial dan aspek ESG, serta mendukung capaian *Sustainable Development Goals (SDGs)*

Laporan Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan sesuai dengan ketentuan POJK Nomor 51/POJK.03/2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan Bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten dan Perusahaan Publik. Ketentuan ini menjadi pedoman bagi Perusahaan dalam mengintegrasikan aspek ESG ke dalam *core business* kami guna mengoptimalkan kinerja keberlanjutan untuk mendukung keberlangsungan usaha perusahaan dalam jangka panjang

Perusahaan memitigasi potensi dampak negatif dari aktivitas Penjaminan melalui penguatan penjaminan pada kegiatan usaha ramah lingkungan serta penempatan investasi pada instrumen yang mendukung keberlanjutan (*sustainable investment*) dengan tetap memperhatikan pemenuhan atas prinsip GCG. Kami juga secara berkala memperbarui prosedur terkait pembiayaan berkelanjutan guna menemukan solusi yang lebih sesuai dalam menghadapi tantangan keberlanjutan.

STRATEGI DALAM PENGELOLAAN RISIKO DAN PELUANG TERKAIT KEBERLANJUTAN

Perusahaan juga telah mengidentifikasi dan menilai risiko dan peluang keberlanjutan serta perubahan iklim yang dijadikan dasar untuk pengembangan strategi Perusahaan Risiko dan peluang keberlanjutan serta perubahan iklim disajikan pada tabel di bawah ini

KATEGORI RISIKO	DEFINISI	POTENSI DAMPAK FINANSIAL	PENGELOLAAN RISIKO
Strategis	Risiko akibat ketidaktepatan dalam pengambilan dan/atau pelaksanaan suatu keputusan strategis serta kegagalan dalam mengantisipasi perubahan lingkungan bisnis.	Pertumbuhan laba perusahaan mengalami penurunan yang disebabkan oleh ketidaktepatan strategi yang diterapkan.	<ul style="list-style-type: none"> - Evaluasi strategi secara berkala serta penerapan fleksibilitas dalam menyesuaikan rencana. - Penerapan <i>Balanced Scorecard</i> dalam mengevaluasi bisnis dapat digunakan sebagai instrumen pengukuran kinerja yang komprehensif
Operasional	Risiko akibat ketidakcukupan dan/atau tidak berfungsinya proses internal, kesalahan manusia, kegagalan sistem, dan/atau adanya kejadian eksternal yang memengaruhi operasional Lembaga Penjamin.	Berpengaruh terhadap tingkat efisiensi dan kesehatan operasional perusahaan. Selain itu, dampak yang ditimbulkan mencakup efektivitas penggunaan sumber daya, kelancaran proses bisnis, serta kemampuan perusahaan dalam menjaga stabilitas operasional.	Monitoring biaya dapat dikendalikan dengan menggunakan parameter Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO). Rasio ini berfungsi sebagai indikator untuk membandingkan antara peningkatan biaya dan/atau penurunan pendapatan, sehingga tingkat efisiensi perusahaan tetap terjaga.
Penjaminan	Risiko kegagalan Lembaga Penjamin untuk memenuhi kewajiban kepada penerima jaminan sebagai akibat dari ketidakcukupan proses analisis kelayakan penjaminan, ketidakcukupan penetapan imbal jasa penjaminan, kegagalan mitra penjaminan bersama atau penjaminan ulang memenuhi kewajibannya.	Berdampak terhadap rasio klaim dan <i>gearing ratio</i> . Semakin tinggi rasio klaim, maka semakin besar beban biaya yang harus ditanggung perusahaan sehingga profitabilitas mengalami penurunan. Sementara itu, <i>gearing ratio</i> berpengaruh terhadap kesehatan permodalan dan tingkat	Pengendalian risiko dilakukan melalui proses seleksi risiko, analisis kelayakan, serta monitoring dan evaluasi yang berkesinambungan. Selain itu, perusahaan menetapkan batas stop loss sebagai langkah antisipatif, serta memanfaatkan mekanisme reasuransi untuk mengalihkan sebagian risiko.

	ketidacukupan cadangan klaim, dan/atau penanganan subrogasi yang tidak memadai.	solvabilitas perusahaan. Apabila kedua rasio tersebut tidak dikendalikan secara efektif, hal ini berpotensi menimbulkan kerugian finansial yang signifikan serta mengganggu keberlangsungan usaha.	
Kredit	Risiko akibat kegagalan pihak lain dalam memenuhi kewajiban kepada Lembaga Penjamin.	Tidak tercapainya pengembalian piutang subrogasi dan reasuransi berdampak pada penurunan pendapatan perusahaan. Selain itu, peningkatan jumlah piutang bermasalah mengharuskan pembentukan cadangan kerugian, yang pada akhirnya menambah beban biaya. Kondisi ini juga berpotensi menimbulkan gangguan terhadap arus kas dan likuiditas	Strategi penagihan dilakukan baik secara langsung kepada pihak terjamin maupun melalui mitra bank dan perusahaan reasuransi. Selain itu, perusahaan juga membentuk cadangan kerugian piutang sebagai langkah antisipatif terhadap risiko piutang yang tidak tertagih.
Pasar	Risiko pada posisi aset, liabilitas, ekuitas, dan/atau rekening administratif termasuk transaksi derivatif akibat perubahan secara keseluruhan dari kondisi pasar.	Berdampak pada fluktuasi pasar, seperti perubahan suku bunga, nilai tukar, maupun kondisi ekonomi, serta memengaruhi Return on Assets (ROA). Penurunan ROA mencerminkan berkurangnya kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dari aset yang dimiliki.	Pengelolaan eksposur terhadap perubahan pasar dilakukan melalui diversifikasi aset dan investasi, sehingga perusahaan tidak bergantung pada satu sumber risiko. Selain itu, optimalisasi manajemen aset dan liabilitas (Asset and Liability Management/ALMA) diterapkan untuk menyeimbangkan pendapatan dan biaya.
Likuiditas	Risiko akibat ketidakmampuan Lembaga Penjamin untuk memenuhi liabilitas yang jatuh tempo dari sumber pendanaan arus kas dan/atau dari aset likuid yang dapat dengan mudah dikonversi menjadi kas, tanpa mengganggu aktivitas dan kondisi keuangan Lembaga Penjamin.	Berdampak pada kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Apabila <i>current ratio</i> berada pada tingkat rendah, perusahaan berisiko mengalami kekurangan kas untuk membayar utang lancar.	Pengelolaan arus kas dan kewajiban jangka pendek dilakukan secara optimal melalui strategi pengendalian likuiditas. Upaya ini mencakup pengurangan beban pembayaran klaim serta peningkatan pendapatan, baik dari Imbal Jasa Penjaminan (IJP) maupun hasil penagihan piutang.
Hukum	Risiko yang timbul akibat tuntutan hukum dan/atau kelemahan aspek hukum. Termasuk dalam risiko hukum ini adalah ketiadaan peraturan perundang-undangan yang mendukung, kelemahan perikatan seperti tidak dipenuhinya syarat sahnya kontrak dan pengikatan agunan yang tidak sempurna.	Berdampak pada pemberian sanksi, gugatan hukum dan/atau proses litigasi, serta menimbulkan kerugian finansial dan denda. Kondisi ini tidak hanya berimplikasi terhadap beban biaya perusahaan, tetapi juga berpotensi menurunkan reputasi dan kepercayaan pemangku kepentingan.	<ul style="list-style-type: none"> - Kepatuhan terhadap regulasi, apabila diperlukan dapat berkoordinasi dengan konsultan hukum. - Penyusunan dokumentasi perjanjian kerja sama/kontrak yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku. - Melaksanakan <i>review</i> secara berkala terhadap seluruh perjanjian kerja sama untuk memastikan kesesuaian dengan regulasi terbaru, mengidentifikasi potensi risiko hukum, serta menjaga kepastian dan perlindungan hukum bagi semua pihak.
Kepatuhan	Risiko akibat Lembaga Penjamin tidak mematuhi dan/atau tidak melaksanakan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku bagi Lembaga Penjamin.	Ketidakpatuhan terhadap peraturan internal perusahaan maupun pelanggaran regulasi OJK dapat berdampak pada pengenaan sanksi administratif, seperti denda, pembatasan operasional atau bahkan penghentian sebagian kegiatan usaha.	<ul style="list-style-type: none"> - Upaya kepatuhan perusahaan dilakukan melalui pemantauan dan pembaruan regulasi secara berkala, serta penerapan SOP yang selaras dengan ketentuan OJK. - Meningkatkan <i>awareness</i> terhadap budaya kepatuhan melalui kegiatan sosialisasi yang berkesinambungan - Monitoring dan audit kepatuhan dilaksanakan secara berkala untuk memastikan efektivitas penerapan regulasi. - Menerapkan sistem pelaporan (<i>whistleblowing system</i>) sebagai mekanisme deteksi dini terhadap potensi pelanggaran

POLICY COMMITMENT

Perusahaan senantiasa memastikan bahwa aktivitas operasionalnya telah sesuai dengan berbagai aturan yang relevan.

1. Undang - Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas
2. POJK 11 Tahun 2025 Tentang Penyelenggaraan Usaha Lembaga Penjamin
3. POJK Nomor 51/POJK.03/2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan Bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten, dan Perusahaan Publik
4. Perda Provinsi Jawa Tengah No 9 tahun 2023 tentang Perubahan Bentuk Hukum PT Penjaminan Kredit Daerah Provinsi Jawa Tengah Menjadi PT Penjaminan Kredit Daerah Provinsi Jawa Tengah (PERSERODA)
5. Rencana Bisnis PT. Jamkrida Jateng (Perseroda)
6. Berbagai peraturan lain yang berkaitan dengan Keuangan Berkelanjutan, maupun aspek lingkungan, sosial, dan tata kelola.

Di samping itu, Perusahaan juga senantiasa memastikan bahwa seluruh aktivitas bisnisnya telah sesuai dengan standar internasional yang tercermin dengan telah dimilikinya sertifikat International Standard Organization sebagai berikut :

1. **ISO 9001** tentang sistem manajemen mutu
 2. **ISO 37001** tentang Manajemen Anti Penyuapan (SMAP)
 3. **ISO 27001** tentang Sistem Manajemen Keamanan Informasi
- Selain mengimplementasikan seluruh aktivitas bisnisnya dengan standar internasional seperti ISO, perusahaan juga telah menerapkan :
1. E Sertifikat Penjaminan dari BsRe
 2. *Host to Host*
 3. *Disaster Recovery Centre*

Berdasarkan berbagai peraturan yang telah diacu, kemudian Perusahaan menurunkannya ke dalam berbagai kebijakan internal. Dalam memastikan berbagai kebijakan internal yang dimiliki telah dilaksanakan secara efektif, Hal ini dilakukan agar setiap keputusan diambil oleh Perusahaan tidak memberikan dampak negatif terhadap aspek lingkungan, sosial, dan tata kelola. Uji tuntas yang dilakukan yaitu:

1. Pedoman Tata Kelola Perusahaan
2. Buku Pedoman Perusahaan
3. *Board Manual*
4. Piagam Satuan Pemeriksa Internal (SPI)
5. Pedoman Operasional Perusahaan Berbasis Mutu
6. Pedoman Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)
7. Pedoman Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP)
8. Pedoman Sistem Manajemen Keamanan Informasi (SMKI)

Perusahaan juga senantiasa melaksanakan prinsip kehati-hatian untuk menangani dampak negatif yang terjadi pada kegiatan operasional perusahaan terhadap aspek lingkungan, sosial, dan tata kelola. Salah satu langkah pencegahan yang dilaksanakan adalah dengan melakukan sosialisasi kebijakan dan memastikan bahwa kebijakan telah dipahami oleh seluruh karyawan.

ROADMAP IMPLEMENTASI KEUANGAN BERKELANJUTAN

Perusahaan memiliki peta jalan (roadmap) penerapan keuangan berkelanjutan sebagai pedoman pencapaian target kinerja keberlanjutan jangka pendek dan jangka panjang. Peta jalan Perusahaan berjangka lima tahun (2025 - 2030) dengan target pencapaian yang terbagi ke dalam tiga fase.

1. Fase Pertama (2025 -2026)

- Membangun budaya berkelanjutan
- Pembentukan Visi, Misi dan tata nilai berkelanjutan
- Penyesuaian organisasi perusahaan melalui penguatan tugas pokok dan fungsi ESG.

2. Fase kedua (2027-2028)

- Memperkuat tata Kelola berkelanjutan
- Mengimplementasikan strategi keuangan berkelanjutan yang berdampak bagi peningkatan portofolio penjaminan UMKM dan usaha produktif lainnya dan investasi berkelanjutan.

3. Fase ketiga (2029-2030)

- Menjalankan strategi jangka pendek dan jangka panjang untuk meningkatkan nilai dan portofolio bisnis yang sejalan dengan keuangan berkelanjutan.

TENTANG KAMI

PT Jamkrida Jateng adalah Perusahaan Penjaminan yang didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 tahun 2014. Perusahaan resmi berdiri pada tanggal 06 Desember 2014 dengan nama Perseroan Terbatas Penjaminan Kredit Daerah Provinsi Jawa Tengah disingkat PT Jamkrida Jateng hadapan Notaris Prof DR Liliana Tedjosaputro, SH, MH, MM dengan Akta Nomor 38 dan telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan Nomor : AHU-38355.40.10.2014 tanggal 08 Desember 2014.

PT Jamkrida Jateng memperoleh **Izin Usaha** dari Otoritas Jasa Keuangan (**OJK**) Pada **tanggal 03 Februari 2015** dengan Salinan Keputusan Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Nomor : KEP – 7 / D.05 / 2015.

Di tahun 2025 Jamkrida Jateng telah mencapai kinerja yang positif dengan Pendapatan IJP Bruto (Cash Basis) keseluruhan dari bisnis Penjaminan diperkirakan sebesar lebih dari Rp 300 Milyar serta total Mitra baik Lembaga Keuangan dan Koperasi sebanyak lebih dari 130 Mitra.

PT Jamkrida Jateng menawarkan beragam layanan keuangan termasuk penjaminan kredit, surety bond, custom bond, kontra bank garansi dan konsultasi manajemen untuk pelaku UMKM dan Usaha Produktif di Jawa Tengah. Melalui Sumber Daya yang handal dan profesional, Jamkrida Jateng telah melayani dan menjamin lebih dari 600.000 Terjamin di Jawa Tengah.

PT Jamkrida Jateng adalah semua hal yang berkaitan tentang Penjaminan. Pada saat kami sepakat dengan Anda, Kami akan memberlakukan Anda secara bijaksana dan rahasia.

PT Jamkrida Jateng secara berkelanjutan menjaga komitmen untuk memberikan shareholder value yang lebih baik dengan berlandaskan penerapan prinsip-prinsip *good corporate governance* serta berusaha merefleksikan etika dan budaya tata kelola yang baik dalam setiap struktur dan kebijakan yang diambil.

Nama Perusahaan	PT Penjaminan Kredit Daerah Provinsi Jawa Tengah (PT Jamkrida Jateng)																		
Bentuk legal	Perusahaan Terbatas																		
Lokasi Operasi	Provinsi Jawa Tengah																		
Bidang Usaha	Penjaminan																		
Jumlah kantor perwakilan	2																		
Komposisi Pemegang Saham	<table border="1"> <caption>Komposisi Pemegang Saham</caption> <thead> <tr> <th>Persentase</th> <th>Jumlah Saham</th> <th>Entitas Pemegang Saham</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>88,50%</td> <td>140 Miliar Rupiah</td> <td>Pemprov Jawa Tengah</td> </tr> <tr> <td>4,06%</td> <td>6,420 Miliar Rupiah</td> <td>Pemkab Grobogan</td> </tr> <tr> <td>3,93%</td> <td>6,220 Miliar Rupiah</td> <td>Pemkab Demak</td> </tr> <tr> <td>3,16%</td> <td>5 Miliar Rupiah</td> <td>KPRI Bhakti Praja</td> </tr> <tr> <td>0,35%</td> <td>550 juta Rupiah</td> <td>Pemkab Temanggung</td> </tr> </tbody> </table>	Persentase	Jumlah Saham	Entitas Pemegang Saham	88,50%	140 Miliar Rupiah	Pemprov Jawa Tengah	4,06%	6,420 Miliar Rupiah	Pemkab Grobogan	3,93%	6,220 Miliar Rupiah	Pemkab Demak	3,16%	5 Miliar Rupiah	KPRI Bhakti Praja	0,35%	550 juta Rupiah	Pemkab Temanggung
Persentase	Jumlah Saham	Entitas Pemegang Saham																	
88,50%	140 Miliar Rupiah	Pemprov Jawa Tengah																	
4,06%	6,420 Miliar Rupiah	Pemkab Grobogan																	
3,93%	6,220 Miliar Rupiah	Pemkab Demak																	
3,16%	5 Miliar Rupiah	KPRI Bhakti Praja																	
0,35%	550 juta Rupiah	Pemkab Temanggung																	
Alamat kantor Pusat	Jl. Setia Budi No.128, RW.02, Sumurboto, Kec. Banyumanik, Kota Semarang, Jawa Tengah 50269																		
Kontak	(024) 7477666																		
Situs web	https://jamkrida-jateng.co.id/																		

SKALA PERUSAHAAN

Total Aset	Rp 741.086.997.289
Liabilitas	Rp 533.782.749.845
Ekuitas	Rp 207.304.247.444
Pendapatan Operasional	Rp 124.156.216.687
Laba Bersih	Rp 18.692.672.270
Jumlah Karyawan	63 orang
Laki-laki	38 orang
Perempuan	25 orang

Komposisi karyawan berdasarkan jabatan

BOD	: 3
Kepala Divisi	: 1
Kepala Bagian	: 7
Kepala Seksi	: 7
Staff	: 37
Non Staff	: 8

Komposisi karyawan berdasarkan usia

20-30 tahun	: 13
31-40 tahun	: 30
41-50 tahun	: 18
>50 tahun	: 2

Komposisi karyawan berdasarkan pendidikan

S2	: 8
S1	: 37
D4	: 5
D3	: 6
SMA	: 5
SMK	: 1
SMPLB	: 1

Komposisi karyawan berdasarkan status kepegawaian

Karyawan Kontrak	: 14
Karyawan Tetap	: 49
Karyawan Alih daya	: -

TATA KELOLA BERKELANJUTAN**PENANGGUNGJAWAB PENERAPAN KEUANGAN BERKELANJUTAN**

Perusahaan telah memiliki *person in charge* (PIC) yang bertanggung jawab kepada Direksi dan bertugas memberikan masukan, saran, dan tanggapan mengenai kegiatan dan anggaran Keberlanjutan Perusahaan. Komposisi dan jumlah anggota terdiri dari:

1. Direksi
2. Divisi Finance, Accounting & Investasi
3. Departemen Manajemen Risiko
4. Divisi Pelayanan & IT
5. Departemen Customer Relation
6. Departemen HRD & GA
7. Departemen Internal Audit

PIC memiliki tugas sebagai berikut:

1. Mengawasi, menetapkan dan memberi arahan terkait *roadmap*, strategi, kebijakan, inisiatif dan *Key Performance Indicator* (KPI) terkait aspek Keberlanjutan di Perusahaan, serta memastikan selaras dengan strategi atau *roadmap* yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah atau OJK;
2. Mereviu Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan (RAKB) dan Laporan *Sustainability* yang telah disusun oleh seluruh Divisi/ Satuan Perusahaan serta rekomendasi maupun langkah korektif terkait penyusunannya dan didokumentasikan;
3. Memberikan pertimbangan dan arahan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas kegiatan demi tercapainya tujuan dan target keberlanjutan Perusahaan; serta
4. Menyampaikan laporan hasil kerja kepada Direksi secara berkala.

PRODUK, LAYANAN, DAN KEGIATAN USAHA YANG DIJALANKAN

Sebagaimana tertuang dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia nomor 11 tahun 2025 tentang penyelenggaraan usaha lembaga penjamin Bab II Kegiatan Usaha pasal 2 perusahaan menjalankan kegiatan usaha di bidang penjaminan yang meliputi

Usaha penjaminan meliputi:

- a. penjaminan Kredit, Pembiayaan, atau Pembiayaan Berdasarkan Prinsip Syariah yang diberikan oleh Lembaga Keuangan;
- b. penjaminan pinjaman yang disalurkan oleh koperasi simpan pinjam atau koperasi yang mempunyai unit usaha simpan pinjam kepada anggotanya; dan
- c. penjaminan Kredit dan/atau pinjaman program kemitraan yang disalurkan oleh badan usaha milik negara dalam rangka program kemitraan dan bina lingkungan.

Selain usaha penjaminan sebagaimana dimaksud di atas perusahaan penjaminan dapat melakukan:

- a. penjaminan atas surat utang;
- b. penjaminan pembelian barang secara angsuran;
- c. penjaminan transaksi dagang;
- d. penjaminan pengadaan barang dan/atau jasa (surety bond);
- e. penjaminan bank garansi (kontra bank garansi);
- f. penjaminan surat kredit berdokumen dalam negeri;
- g. penjaminan letter of credit;
- h. penjaminan kepabeanan (customs bond);
- i. penjaminan cukai;
- j. pemberian jasa konsultasi manajemen terkait dengan kegiatan usaha penjaminan; dan
- k. kegiatan usaha lainnya setelah mendapat persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan.

RANTAI PASOK (*SUPPLY CHAIN*)

Dalam menjalankan operasionalnya, Perusahaan membangun kemitraan strategis dengan berbagai pemasok barang dan jasa untuk mendukung kelancaran kegiatan bisnisnya. Pada tahun 2025, Perusahaan telah bekerja sama dengan 2 pemasok. Pemasok barang dan jasa menyuplai guna menunjang kegiatan bisnis Perusahaan. Dalam melakukan proses pengadaan barang dan jasa, Perusahaan telah memiliki Pedoman Pengadaan Barang dan/ atau Jasa yang Tersentralisasi yang menunjukkan bahwa proses penilaian pemasok, Perusahaan telah memperhatikan aspek lingkungan dan sosial.

KEANGGOTAAN PADA ASOSIASI

1. ASIPPINDO (Asosiasi Perusahaan Penjaminan Indonesia)
2. ASPENDA (Asosiasi Penjaminan Kredit Daerah)
3. Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Indonesia (LAPSPI)
4. Forum Komunikasi Industri Jasa Keuangan Jawa Tengah

Pengelolaan Topik Material

Dalam mengelola topik material, kami melakukan pemetaan atas isu signifikan terkait topik material serta identifikasi dampak bisnis Perusahaan terhadap lingkungan dan pemangku kepentingan, maupun dampak dari integrasi aspek Perusahaan terhadap kinerja penjaminan. Kami juga merancang upaya mitigasi dan strategi untuk mengatasi dampak tersebut serta menyelaraskannya dengan SDGs.

TOPIK MATERIAL

1. Kinerja Ekonomi
2. Pengelolaan Konflik Kepentingan
3. Literasi Keuangan
4. Kelangsungan Bisnis & Risiko Teknologi
5. Aksi Iklim
6. Kesejahteraan Karyawan
7. Pelatihan dan Pendidikan

TANGGUNG JAWAB LAPORAN KEBERLANJUTAN TAHUN BUKU 2025

Kami yang bertanda tangan di bawah ini telah melakukan peninjauan berbagai informasi yang dilaporkan dalam Laporan Keberlanjutan PT Jamkrida Jateng Tahun Buku 2025, termasuk di dalamnya informasi topik material. Kami bertanggung jawab atas laporan yang telah sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 51/POJK.03/2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan bagi Lembaga Jasa keuangan, Emiten dan Perusahaan Publik. Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Semarang, 27 April 2026

Dewan Komisaris



PT Jamkrida Jateng
Komisaris Independen